

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Akuntansi keuangan (pemerintahan) daerah di Indonesia merupakan salah satu bidang dalam akuntansi sector publik yang mendapat perhatian besar dari berbagai pihak semenjak reformasi di tahun 1998. Hal tersebut disebabkan oleh adanya kebijakan baru dari pemerintah republik Indonesia yang mereformasi berbagai hal. Reformasi dilakukan dengan merubah UU No. 22 tahun 1999 menjadi UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, dan UU No.25 tahun 1999 menjadi UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Undang-Undang diatas menjadikan pedoman pelaksanaan otonomi daerah lebih jelas dan terperinci, khususnya tentang pengelolaan keuangan daerah dan pertanggungjawaban.

Bastian (2001:6) menyatakan bahwa diperlukan suatu laporan keuangan yang handal dan dapat dipercaya agar dapat menggambarkan sumberdaya keuangan daerah berikut dengan analisis prestasi pengelolaan keuangan daerah itu sendiri. Analisis prestasi dalam hal ini adalah kinerja keuangan dari pemerintah daerah itu sendiri yang dapat didasarkan pada kemandirian dan kemampuannya untuk memperoleh, memiliki, memelihara dan memanfaatkan keterbatasan sumber-sumber ekonomis. Untuk mendukung kebijakan ini perlu dibangun pendekatan kinerja. Pemerintah daerah sebagai pihak yang disertai tugas menjalankan roda

pemerintahan. Pembangunan dan pelayanan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. (Mardiasmo, 2002:121).Tuntutan yang tinggi terhadap kinerja dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah berujung pada kebutuhan pengukuran perintah daerah yang akurat, relevan, tepat waktu dan dapat dipercaya. Untuk itu pemerintah daerah dituntut untuk mampu membangun ukuran kinerja yang baik. Hal ini sangat penting karena sering terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan anggaran daerah.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, kebutuhan akan dana yang cukup untuk melaksanakan semua program pembangunan daerah sangat diperlukan. Pemerintah Daerah sebagai organisasi negara yang diberi kekuasaan untuk mengatur dan mengurus kepentingan daerah merupakan pihak yang paling bertanggungjawab sehubungan dengan pelaksanaan kebijakan otonomi daerah. Hal ini dikaitkan dengan pemberian pelayanan publik yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Peningkatan kesejahteraan masyarakat salah satunya dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang bersangkutan. Oleh karena itu kemampuan pemerintah daerah dalam mengolah dengan mencari sumber-sumber pembiayaan secara optimal akan sangat menentukan keberhasilan meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah. Namun dalam beberapa kasus yang terjadi diindonesia. Salah satunya adalah sering terlambatnya pencarian dana kesektor riil. Keterlambatan pencairan dana kesektor riil menyebabkan pelaksanaan

proyek atau pembangunan terhadap sehingga sumbangan pemerintah daerah terhadap perekonomian menjadi minim. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan Direktur Jendral Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan RI.

Sebagaimana diketahui bahwa pembiayaan penyelenggara pemerintah di daerah yang berdasarkan asas desentralisasi sepenuhnya dilakukan berbasis pada APBD masing-masing daerah. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas ini, maka daerah diberi kewenangan untuk memungut pajak atau retribusi yang dimungkinkan sekaligus untuk mengelola hasil-hasil sumber daya alam yang merupakan sumber-sumber penerimaan daerah. Selain sumber-sumber di daerah, penerimaan daerah dalam APBD juga bersumber dari transfer dana pusat baik dalam bentuk DAU, DAK atau jenis transfer lainnya. Hal ini sejalan dengan Halim (2007:252) yang menyatakan bahwa sumber-sumber dana bagi daerah dalam APBD yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Lain-lain pendapatan yang sah. Sumber-sumber inilah yang dikelola oleh pemerintah daerah melalui APBD.

Berdasarkan UU Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan berperan untuk memberikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan transaksi selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan pemerintah daerah berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan, sehingga laporan tersebut harus dibuat secara

sederhana agar mudah dipahami oleh pembaca laporan. Meskipun laporan keuangan sudah bersifat general purposive, artinya dibuat bertujuan umum dan dalam format yang sederhana untuk dapat memenuhi kebutuhan dalam berbagai kajian sebelumnya bahwa tidak semua pembaca laporan tersebut dengan baik. Selain itu tidak semua pemangku kepentingan memahami akuntansi yang merupakan alat untuk menghasilkan suatu laporan keuangan oleh karena tidak semua pengguna laporan keuangan memahami akuntansi. Untuk menanggulangi masalah ini, maka bagi semua pemangku kepentingan yang mengandalkan suatu laporan keuangan untuk membuat keputusan.

Analisis laporan keuangan melalui pengukuran kinerja keuangan untuk kepentingan publik penting artinya dengan tujuan mengevaluasi dan membantu dalam perbaikan kinerja melalui perbandingan antara skema kerja dan pelaksanaannya. Selain itu dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk peningkatan kinerja khususnya keuangan daerah pada periode berikutnya. Adanya kebijakan pemberian otonomi daerah mengakibatkan adanya desentralisasi sistem pemerintahan diberbagai daerah, termasuk pada pemerintah kabupaten sikka. Oleh karena itu pemerintah kabupaten sikka sebagai pihak yang disertai tugas untuk menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk selanjutnya dinilai, apakah pemerintah kabupaten sikka berhasil

menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak pada semua pihak yang berkepentingan.

Masyarakat atau penduduk sebagai salah satu sumber daya pembangunan, yaitu sebagai subjek sekaligus sebagai objek pembangunan yang selalu adanya transparansi pengelolaan anggaran keuangan oleh pemerintah, termasuk pemerintah kabupaten sikka. Hal inilah yang menyebabkan masyarakat merasa penting untuk memantau kinerja pemerintah kabupaten sikka sekaligus untuk memastikan apakah pengelolaan keuangan telah berjalan dengan baik atau tidak. Banyak kasus yang terjadi di berbagai daerah, realisasi APBD tidak sesuai dengan anggaran. Hal ini dapat disebabkan oleh banyak faktor, antara lain taksiran pendapatan yang tidak selalu sama dengan pendapatan yang benar-benar diterima. Jumlah pendapatan daerah yang kurang untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang ada. Kondisi ini mengakibatkan diperlukannya berbagai perubahan dalam pengelolaan anggaran karena dalam banyak fakta pelaksanaan APBD tidak sesuai dengan yang di anggarakan.

Kemandirian dan kemampuan dalam melakukan pengelolaan keuangan masih sangat rendah. Hal ini mengakibatkan ketergantungan pemerintah Kabupaten sikka pada Pemerintah Pusat dan provinsi sangat tinggi. Maka dari itu pemerintah kabupaten sikka berupaya melakukan sosialisasi mengenai pentingnya membayar pajak dan retribusi sehingga wajib pajak pun melakukan pembayaran dengan tepat waktu. Pemerintah Kabupaten sikka sedang berupaya meningkatkan PAD dan

memaksimalkan berbagai sumber potensi pendapatan yang mampu berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah. Hal ini mendukung agar pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten Sikka meningkat. Berikut adalah gambaran perkembangan APBD Kabupaten Sikka selama lima tahun anggaran (2014-2018).

Tabel 1.1. Laporan Perkembangan APBD Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2014-2018

Sumber Pendapatan	Tahun Anggaran 2014		Tahun Anggaran 2015		Tahun Anggaran 2016		Tahun Anggaran 2017		Tahun Anggaran 2018	
	Anggarann	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pendapatan	797.314.700.000	751.364.077.948	906.740.500.000	882.618.608.611	1.119.370.000.000	1.061.462.517.991	1.164.475.000.000	994.311.104.321	1.148.500.000.000	1.088.045.723.053
Pendapatan Asli Daerah	62.461.378.889	47.158.618.136	78.754.102.882	78.096.258.303	98.858.138.792	80.269.749.570	142.894.813.580	71.250.272.488	113.842.662.820	96.754.387.467
Dana Perimbangan	634.879.440.958	613.748.002.848	684.374.729.090	678.171.446.590	903.787.713.442	868.141.530.905	874.921.848.330	781.738.364.148	828.522.638.244	815.667.524.215
Lain-lain Pendapatan Yang Sah	99.973.880.153	90.457456.964	143.611.668.088	126.350.903.718	116.724.147.766	113.051.237.516	146.658.338.090	141.232.467.685	206.134.698.936	175.623.811.371
Belanja Daerah	841.611.299.137	696.588.144.528	1.025.230.537.821	895.239.798.028	1.219.581.664.527	1.031.425.734.211	1.224.457.316.547	989.144.928.862	1.190.849.219.386	1.057.588.217.938
Belanja Tidak Langsung	508.631.677.060	457.907.187.352	613.743.173.181	534.621.401.542	671.739.054.009	614.960.839.426	655.169.335.066	616.961.894.010	708.929.254.464	671.438.757.788
Belanja Langsung	332.979.622.077	238.680.957.176	411.487.400.640	360.618.396.486	547.842.610.518	416.464.894.785	569.287.981.481	372.183.034.852	481.919.964.922	386.149.460150
Pembiayaan	44.296.599.137	54.775.933.420	118.490.037.821	116.332.853.943	100.211.664.527	99.919.338.527	59.982.316.547	59.803.004.546	42.349.219.386	41.982.737.386
Penerimaan Daerah	45.796.599.137	90.000.000	121.490.037.821	119.332.853.943	104.211.664.527	103.919.338.527	69.982.316.547	69.803.004.546	42.349.219.386	41.982.737.386
Pengeluaran Daerah	1.500.000.000	1.500.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	-	-

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran BPKAD Kabupaten Sikka

Berdasarkan data APBD lima tahun dari tahun 2014-2018 terlihat mengalami fluktuatif setiap tahunnya. Tidak hanya itu realisasi penerimaan pun dalam beberapa item pendapatan dan belanja nilainya lebih kecil dari yang dianggarkan. Hal itu dapat dilihat dari realisasi pendapatan dan belanja Kabupaten Sikka berturut-turut sebagai berikut: pada tahun 2014 realisasi pendapatan sebesar Rp751.364.077.948 sedangkan yang dianggarkan sebesar Rp797.314.700.000, pada tahun 2015 realisasi pendapatan sebesar Rp882.618.608.611 sedangkan yang dianggarkan sebesar Rp906.740.500.000, pada tahun 2016 realisasi pendapatan sebesar Rp1.061.462.517.991 sedangkan yang dianggarkan sebesar Rp1.119.370.000.000, pada tahun 2017 realisasi pendapatan sebesar Rp994.311.104.321 sedangkan yang dianggarkan sebesar Rp1.164.475.000.000, pada tahun 2018 realisasi pendapatan sebesar Rp1.088.045.723.053 sedangkan yang dianggarkan sebesar Rp1.148.500.000.000, pada sisi belanja pada tahun 2014 realisasi belanja sebesar Rp696.588.144.528 yang di anggarkan sebesar Rp841.611.299.137, pada tahun 2015 realisasi belanja Rp895.239.798.028 sedangkan yang dianggarkan sebesar Rp1.025.230.537.821, pada tahun 2016 realisasi belanja sebesar Rp1.031.425.734.211 sedangkan yang dianggarkan Rp1.219.581.664.527, pada tahun 2017 realisasi belanja Rp989.144.928.862 sedangkan yang dianggarkan Rp1.224.457.316.547, pada tahun 2018 realisasi belanja sebesar Rp1.057.588.217.938 sedangkan yang dianggarkan sebesar Rp1.190.849.219.386. Karena pada umumnya seperti yang kita ketahui bahwa belanja daerah ditopang oleh pendapatan daerah. Maka, belanja tidak seharusnya lebih besar dari pendpatan daerah.

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan yang dituangkan dalam APBD secara langsung maupun tidak langsung merupakan cerminan dari kemampuan daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan sosial kepada masyarakat. Berdasarkan tabel tersebut dapat juga diketahui bahwa anggaran pada daerah kabupaten sikka selama kurun waktu 2014-2018 terdapat sisa anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa kabupaten sikka dalam merealisasikan anggarannya kurang optimal. Selain itu mengacu tentang undang-undang otonomi daerah, setiap daerah harus bertanggungjawab untuk menyelenggarakan berbagai pelayanan kepada masyarakat berbasis pada prinsip keterbukaan, partisipasif, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Adapun penelitian terdahulu yang diteliti oleh Fidelia A. Okctaviani, dengan judul Evaluasi Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2014-2016, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif dengan menggunakan rasio pada kinerja keuangan pendapatan daerah dan kinerja keuangan belanja daerah. Berdasarkan hasil analisis kinerja pendapatan dan belanja daerah provinsi Nusa Tenggara Timur menggambarkan kinerja dengan analisis varians terjadi selisih kurang, ketergantungan pada pemerintah pusat sangat tinggi, rasio kemandirian memiliki kriteria sangat kurang, rasio desentralisasi fiskal memiliki kriteria sedang dan rasio efektifitas APBD sangat efektif, sedangkan analisis belanja dengan menggunakan analisis varians terjadi selisih kurang, rasio efisiensi belanja kurang efisien, rasio aktivitas pemerintah

provinsi Nusa Tenggara Timur penggunaannya lebih banyak untuk belanja tidak langsung dibandingkan dengan belanja langsung.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Evaluasi Kinerja Keuangan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2014-2018”**

1.2.RumusanMasalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka, masalah yang dapat dirumuskan adalah :Bagaimana Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2014-2018?

1.3.TujuanPenelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :Untuk mengetahui Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka TahunAnggaran 2014-2018.

1.4.ManfaatPenelitian

Melalui Penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan peneliti tentang evaluasi kinerja pada anggran pendapatan dan belanja daerah.

2. Bagi Pemerintah Kabupaten Sikka

Sebagai bahan untuk mengkaji lebih lanjut kinerja keuangan pemerintah daerah, dan mendorong untuk lebih selektif dalam merencanakan program atau kegiatan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah referensi sebagai bahan penelitian lanjutan yang lebih mendalam pada masa yang akan datang.